

ISSN: 2089-9211

Indonesian Journal of
DIALECTICS
IJAD

UNPAD PRESS
Academic Publisher

DAFTAR ISI

Perempuan Dalam Profesi Kepolisian
Edwin Rizal

Konstruksi Makna Penyandang Filariasis Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
Purwanti Hadisiwi

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Terhadap Efektivitas Produksi Perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
Sukarman Kamuli

Peranan Birokrasi Pemerintahan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
Samahuddin Muharram

Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kesehatan Dasar Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
Ikeu Kania

Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Terhadap Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kota Palu Sulawesi Tengah
Muh. Nawawi

Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah
Nurhannis

Pengaruh Optimalisasi Komunikasi Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap Peningkatan Derajat Kesehatan Anak Usia Dini
Susanne Dida



ARTIKEL**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
DASAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT*****THE INFLUENCE POLICY IMPLEMENTATION STANDARDS
SERVICE (MSS) IN THE HEALTH SECTOR OF THE EFFECTIVENESS
OF BASIC HEALTH PROGRAM IN GARUT DISTRICT HEALTH OFFICE*****IKEU KANIA****UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**Program Doktor, Program Studi Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD
Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135
e-mail: ikeukania@gmail.com**

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berawal dari belum efektifnya pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya angka harapan hidup (AHH). Kondisi ini diduga dari belum berhasilnya implementasi kebijakan kesehatan terutama implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap pengaruh implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar.

Penelitian ini menggunakan desain *explanatory research* dengan metode pendekatan kuantitatif dan teknik analisis statistika menggunakan SEM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan melalui observasi, angket dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar. Dimensi sikap para pelaksana memiliki nilai paling kecil dan kurang mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan, oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa sikap para pelaksana kebijakan belum menunjukkan sikap yang baik. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan konsep baru bahwa sikap para pelaksana yang kurang disiplin dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SPM, Kesehatan, Efektivitas

Abstract

The background of this study originated from yet effective implementation of primary health programs in Garut District Health Office. This is indicated by the low life expectancy (AHH). This condition is thought to have successful implementation of health policy particularly in health policy implementation of SPM. The purpose of this study is to reveal the influence of SPM in health policy implementation of the effectiveness of the implementation of primary health programs.

This study used an explanatory research design using quantitative approaches and statistical analysis techniques using SEM. Technique of data collecting is done through study of documentation and field study through observation, questionnaires and interviews.

The results showed that in health policy implementation of SPM significantly influence the effectiveness of basic health programs. Dimensional attitude of the implementers have the smallest value and less able to measure or reflect the implementation of the policy variables, can therefore be argued that the attitude of the implementers have not shown a good attitude. Therefore, the results of this study can be put forward a new concept that the attitude of the implementers that are less disciplined and less responsible in carrying out tasks can lead to failure of policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, SPM, Health, Effectiveness

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan inti dari pembangunan nasional di Indonesia, oleh karena itu semua program pembangunan harus difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia. Elemen-elemen pembangunan sumber daya manusia secara tegas menggarisbawahi bahwa sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yaitu berpendidikan, berdaya beli dapat menjalani hidup dengan sehat dan panjang umur. Pilihan hidup sehat merupakan hak bagi setiap manusia. Sehat adalah suatu kondisi terbebasnya tubuh dari gangguan fisik maupun mental. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan disusunnya suatu kebijakan SPM bidang kesehatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 58 Tahun 2003. Kebijakan SPM bidang kesehatan yang dituangkan dalam surat keputusan tersebut disusun dengan maksud sebagai acuan atau tolok ukur bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Adapun tujuan kebijakan SPM bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Secara operasional, sejak tahun 2004 pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengacu pada standar pelayanan minimal

(SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 58 Tahun 2003. Kebijakan SPM bidang kesehatan ini memuat tentang jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Namun berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa target yang tercantum dalam kebijakan itu belum tercapai, hal ini terlihat dari masih banyaknya masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, status gizi buruk dan masalah-masalah kesehatan lingkungan lainnya yang belum tertanggulangi.

Belum tercapainya target seperti yang dikemukakan di atas, selain disebabkan oleh minimnya anggaran juga disebabkan kurang memadainya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Saat ini di Kabupaten Garut hanya terdapat 140 orang dokter dengan perincian (72 orang dokter umum dan 19 orang dokter gigi pada dinas kesehatan termasuk puskesmas) serta 49 orang dokter di RS Slamet dan RS Guntur. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.380.981 jiwa, maka idealnya jumlah dokter umum menurut DEPKES RI tahun 2010 yaitu sebanyak 952 orang sehingga tercapai rasio pelayanan 1:2.500. Jumlah bidan hanya 604 orang dengan 240 orang di antaranya merupakan bidan desa, idealnya jumlah bidan sebanyak 2.380 bidan untuk mencapai rasio pelayanan 1:1.000

Hal lain yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan adalah sumber daya seperti sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Garut kondisinya belum

lengkap. Dari 64 puskesmas yang tersebar di 42 kecamatan, hanya ada 15 puskesmas yang memiliki ruang rawat inap. Dan berdasarkan hasil pengamatan, banyak pasien yang memerlukan perawatan inap (opname) tidak dapat ditangani dengan baik mengingat ruang dan alat-alat medis yang dimiliki sangat terbatas. Ketidaklengkapan sarana dan prasarana tersebut sangat terkait dengan anggaran kesehatan yang tersedia dari APBD kabupaten kurang memadai.

Selain ketidaklengkapan sarana dan prasarana, dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan, masih terdapat sikap yang kurang baik dari para tenaga pelayan kesehatan di puskesmas, sehingga masyarakat kurang dilayani dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya sikap diskriminatif, kurang ramah serta kurang tanggap dalam memberikan pelayanan. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut belum dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik sehingga target pelayanan kesehatan dalam kebijakan SPM bidang kesehatan banyak yang belum tercapai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *explanatory research* dengan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan jumlah populasi sebanyak 535 orang yang terdiri dari 87 orang tenaga kesehatan struktural dan 448 orang tenaga fungsional tersebar di 64 puskesmas di wilayah Kabupaten Garut. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengambilan sampel wilayah (*Cluster Random Sampling*) dengan melihat wilayah jabatan dan ukuran sampel sebanyak 370 responden yang di ambil dengan menggunakan pendekatan *power analysis*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan melalui observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan *structural equation modeling* (SEM).

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam analisis pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, penulis menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM). Adapun langkah selanjutnya sebelum menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan SEM ada beberapa tahapan analisis yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut : (1) menguji normalitas data; (2) melakukan analisis model pengukuran; dan (3) melakukan analisis model struktural. Setelah pengujian model disimpulkan, langkah selanjutnya adalah menjelaskan seberapa besar pengaruh dari implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2
Pengujian Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

Variabel	Koefisien Jalur	Nilai t hitung	Nilai t-tabel	Keterangan
Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (X)	0.79	10.63	1.966	Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel di atas, maka dari hasil perhitungan memberikan koefisien jalur sebesar 0.79 dengan nilai t hitung sebesar 10.63 lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel 1.966 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian model dengan menggunakan statistik SEM, maka dari seluruh dimensi pada variabel implementasi kebijakan dinyatakan valid dan handal sehingga mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Besarnya pengaruh dibentuk oleh enam dimensi, dimana yang memiliki nilai paling mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan adalah dimensi sumber daya dan karakteristik agen pelaksana. Selanjutnya dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik, serta dimensi standar dan sasaran kebijakan, dan yang terakhir adalah dimensi sikap para pelaksana.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, dimensi yang memiliki koefisien validitas paling rendah adalah dimensi sikap para pelaksana. Hasil ini mengindikasikan bahwa sikap para pelaksana kurang mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan, sedangkan kelima dimensi yang lain yaitu dimensi standar dan sasaran kebijakan, dimensi sumber daya, dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dimensi karakteristik agen

pelaksana, dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan. Namun secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hasil pengujian model, maka ke enam dimensi tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam membentuk variabel implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sehingga dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar.

Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap para pelaksana merupakan komponen-komponen yang sangat menentukan kinerja implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila standar dan sasaran kebijakan yang berfungsi untuk menguraikan keseluruhan tujuan dari keputusan kebijakan dapat dipahami secara baik oleh para pelaksana kebijakan. Dalam konteks kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya memiliki peran yang amat menentukan, karena dengan sumber daya yang memadai dan berkualitas dapat dikomunikasikan kepada sasaran penerima kebijakan dengan baik. Oleh karena itu komunikasi menjadi unsur yang penting untuk menginformasikan atau menyampaikan tujuan kebijakan dengan jelas, akurat, konsisten, tepat waktu dengan menggunakan media yang memadai.

Implementasi akan berjalan dengan baik apabila organisasi memiliki karakteristik, sebab karakteristik menentukan pencapaian implementasi kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi, oleh

karena itu karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan menentukan implementasi kebijakan. Di samping itu implementasi kebijakan ditentukan oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sebab kondisi lingkungan memberikan potensi terhadap pencapaian kinerja implementasi kebijakan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan guna mendorong keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana yang memiliki kesadaran, pemahaman, pengertian, kemampuan dan keinginan yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan.

Seluruh dimensi yang diuraikan di atas, mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dengan nilai yang cukup besar sehingga dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Besarnya nilai pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang cukup baik meskipun belum dapat mengefektifkan pelaksanaan program kesehatan dasar, hal ini terlihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata belum menyentuh kepada kebutuhan kesehatan masyarakat. Program kesehatan dasar yang dilaksanakan pada saat ini belum dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga hasilnya pun belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian dengan pengujian model menggunakan teknik analisis statistika *structural equation modeling* (SEM) menguatkan model dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Meski hasil pengujian model ini menguatkan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, tetapi kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa komponen-komponen implementasi kebijakan belum memberikan hasil yang memuaskan. Belum berhasilnya implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, ditunjukkan oleh belum efektifnya pelaksanaan program kesehatan dasar, kondisi ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu serta masih buruknya status gizi bayi dan anak yang pada akhirnya berakibat terhadap rendahnya tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut.

Besarnya nilai pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang cukup baik meskipun belum dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta belum dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga hasilnya pun belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun meskipun demikian maka secara sederhana dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan

merupakan suatu acuan yang dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar. Besarnya pengaruh dibentuk oleh enam dimensi, dimana yang memiliki nilai paling besar dan mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan adalah dimensi sumber daya dan karakteristik agen pelaksana. Selanjutnya dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik, serta dimensi standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan dimensi yang memiliki nilai paling kecil adalah dimensi sikap para pelaksana. Oleh karena itu dari hasil penelitian dapat dikemukakan konsep baru bahwa sikap para pelaksana yang kurang disiplin dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Saran

Mengingat hasil penelitian menunjukkan adanya variabel lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini, maka untuk memperkaya khasanah ilmu administrasi

khususnya mengenai implementasi kebijakan, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terutama menyangkut strategi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan.

Mengingat sumber daya yang belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas yang masih lemah, pembagian kerja yang belum sesuai dengan tupoksi dalam implementasi kebijakan, maka disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan latihan sehingga pegawai dapat melakukan komunikasi dan aktivitas dengan baik sesuai tujuan.

Daftar Pustaka

- Adhyawarman. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia dan Mobilitas Penduduk*. Melalui <http://www.setneg.go.id/index.php>.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Al Rasyid, Harun. 1993. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Penyunting : Teguh K. Bandung : Program Pascasarjana UNPAD
- Anderson, James. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, Rinehart and Winston.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Insani. 2007. *Kebijakan Standar pelayanan Minimal*. Jakarta : STIA
- Jones, C.O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. California : Wadsworth, Inc.
- Mazmanian, D.A., & Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London : Scott, Foresman and Company.
- Metter Van & Horn Van. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. Departement of Political Science Ohio State University. Administration and Society. Vol. 6 No 4 February 1975.
- Mubyarto. 2001. *Model dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Era Otonomi daerah*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Ritonga. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia : Antara Bantuan dan Investasi Sosial*. Kompas : Senin 12 Oktober 2009.

- Rosadi, Dedi. 2009. *Kebijakan Publik (Materi Kuliah)*. Bandung : Pascasarjana UNPAD
- Saefullah, A. Djadja. 2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD. Y Press.ogyakarta : Gajah Mada University
- Singarimum., Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analysis*. Jakarta : CV Intermedia.
- Wijatno. 2008. *Structural Equation Modeling Dengan LISREL 8.8*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winarno, B..2004 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

DOKUMEN-DOKUMEN

- BPS. Provinsi Jawa Barat, 2009. *Indikator Makro Provinsi Jawa Barat*.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Garut. 2009 . *Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2009*
- Departemen Kesehatan RI. 2001. *Paradigma Kesehatan*. Jakarta.
- _____ 2003. *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penerapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta.
- _____ 2009 *Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tentang Kesehatan*. Jakarta : BP. Cipta Karya.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2003 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*.